

**KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN**
(Studi Empiris Pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019)

¹⁾ Wulan Astuti ²⁾ Widaryanti. ³⁾ Panca Wahyuningsih
^{1,2,3)} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara Semarang
wdr.yanti@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *size*, umur pemda, *leverage*, *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *size*, umur Pemda, *leverage*, *intergovernmental revenue*. Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah 34 provinsi di Indonesia periode 2016-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 34 pemerintahan. Metode analisis data menggunakan program SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Umur Pemda tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Size*, umur Pemda, *leverage* dan *intergovernmental revenue* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Kata kunci : *Size*, Umur Pemda, *Leverage*, *Intergovernmental Revenue*, Pengungkapan Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Susilawati (2016) menyatakan bahwa “suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar”. Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Size yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya. (Patrick, 2007) menemukan bahwa size berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penerapan sebuah inovasi administratif baru, yaitu GASB 34 (Setyaningrum & Syafitri, 2012). (H. Sumarjo, 2010) juga menemukan bahwa size berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010), Hilmi (2010), dan Syafitriani, (2012) menemukan hasil yang tidak signifikan tentang pengaruh size daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Umur pemerintah daerah adalah seberapa lama pemerintah daerah itu ada (Mandasari, 2009). Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP. Dengan demikian, semakin besar umur administratif pemerintahan daerah maka penyajian dalam laporan keuangan akan semakin baik. Dalam penelitian (Lesmana, 2010), salah satu variabel yang digunakan adalah umur administratif Pemda yang hasilnya menemukan bahwa umur administratif Pemda berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Leverage menunjukkan seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap hutang. Hutang di sini meliputi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Penggunaan hutang yang berhasil akan meningkatkan pendapatan perusahaan atau meningkatkan ekuitas perusahaan Munawir, (2001). Semakin besar *leverage* menunjukkan besarnya risiko dalam pembayaran hutang perusahaan, sehingga akan semakin sempit dalam pengungkapan laporan keuangan. Sebaliknya, semakin kecil *leverage* menunjukkan rendahnya tingkat hutang perusahaan, maka akan semakin luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

Intergovernmental Revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program daerah (Nam, 2001). Patrick (2007) dalam (Ii et al., n.d.) menemukan adanya pengaruh negatif antara *intergovernmental revenue* terhadap inovasi penerapan GASB 34. Hal ini bertentangan dengan penelitian Suhardjanto et al (2010) menemukan bahwa adanya pengaruh positif *intergovernmental revenue* terhadap kesesuaian pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terhadap pengungkapan laporan keuangan telah banyak dilakukan, akan tetapi hasil penelitian belum konsisten karena adanya perbedaan variabel penelitian, objek penelitian yang digunakan dan perbedaan periode penelitian. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut memicu keinginan untuk dilakukan penelitian kembali mengenai karakteristik pemerintah daerah yang memengaruhi pengungkapan laporan keuangan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *size*, umur pemerintah daerah, *leverage*, *intergovernmental revenue* terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun simultan.

DeGeorge (1992) dalam Asmara (2010) teori keagenan menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik organisasi publik maupun privat. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal (Widaryanti, Widaryanti, Sari, Widalia, Karim, Kurniati, Timotius, Elkana, Bon, 2021).

Zimmerman, (1977) mengatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi. Pada perusahaan, *agency problem* terjadi antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Pada sektor pemerintahan, *agency problem* terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai *principal* dan para pemilih (masyarakat) sebagai *agent*. Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi masalah tersebut, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Tingkat pengungkapan LKPD adalah perbandingan antar pengungkapan yang telah disajikan dalam LKPD dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian tingkat pengungkapan LKPD yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem scoring. Sistem scoring yang dimaksud adalah dengan membuat daftar checklist pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. I tem pengungkapan wajib LKPD berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010 diantaranya PSAP Nomer 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP Nomor 5 tentang akuntansi investasi, PSAP Nomor 5 tentang akuntansi aset tetap, PSAP Nomor 5 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP Nomor 5 tentang akuntansi kewajiban.

Size adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Sebagai informasi bahwa *size* pemerintah yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relatif stabil dalam mengukur *size* pemerintah (Nasser, 2009).

Umur pemerintah daerah dapat diartikan seberapa lama pemerintah daerah ada (Mandasari, 2009). Secara legal, pembentukan suatu pemerintah daerah ditetapkan dalam suatu undang-undang. Variabel umur pemerintah daerah diukur berdasarkan sejak diterbitkannya peraturan perundangan pembentukan pemerintah daerah yang bersangkutan. Umur pemerintah daerah diukur dalam satuan tahun.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya.

Intergovernmental revenue adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat (Hendro Sumarjo, 2010). Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap

pemerintah pusat yaitu dengan membagi total dana perimbangan dengan total pendapatan.

Size menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut, semakin besar organisasi tersebut maka pengungkapan keuangannya pun harus lebih detail karena ukuran pemerintah yang besar akan memiliki aset yang lebih besar pula, maka dari itu pengawasannya pun akan lebih lebih besar, dan Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Daerah yang memiliki ukuran total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan yang lebih besar untuk mengungkapkan lebih banyak dalam LKPD. Berdasarkan teori agensi, pihak principal mendelegasikan suatu pekerjaan kepada pihak agent yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintahan, rakyat memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agent untuk menjalankan tugas pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin besar ukuran pemerintah maka semakin besar pula tuntutan rakyat untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap sebagai upaya peningkatan transparansi dan mengurangi asimetri informasi.

Pemerintah daerah yang memiliki umur yang lebih lama cenderung lebih berpengalaman karena mereka sudah terbiasa membuat laporan keuangan dan setiap pembuatannya tersebut akan diperiksa oleh BPK dan mereka bisa belajar dari pembuatan laporan yang sebelum-sebelumnya untuk bisa mengevaluasi dan menindaklanjuti supaya dapat menghasilkan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan atau SAP.

Semakin tua umur administratif pemerintah daerah semakin banyak pula informasi yang dimiliki untuk diungkapkan dari pada daerah yang masih umur administratif tergolong muda atau masih baru berdiri karena untuk mengindikasikan bahwa melalui umur, suatu daerah seharusnya mampu menunjukkan tujuan dan kesadaran steward dengan semakin mampu meyakinkan publik bahwa daerah tersebut telah cukup mapan dan berpengalaman, sehingga masyarakat akan merespon melalui harapan akan adanya pengungkapan yang lebih baik.

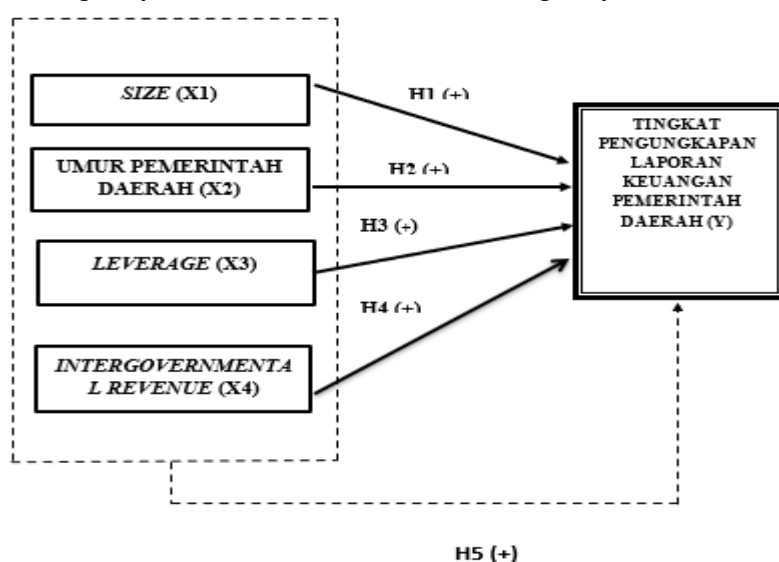
Tingkat *leverage* digunakan untuk memberikan gambaran mengenai modal dan aset yang dimiliki oleh pemerintah dan bisa digunakan untuk membandingkan antara aset dan ekuitas yang dimiliki pemerintah pula, semakin tinggi proporsi aset yang didanai dengan hutang, maka semakin tinggi rasio leverage sehingga pengungkapan aktivitas pendanaan akan semakin tinggi. Daniel (2013) menyatakan, pemerintah dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan informasi kreditur jangka panjang, sehingga pemerintah akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Dalam teori sinyal, pemerintah sebagai agent memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal, sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Pemerintah dengan *leverage* tinggi memiliki risiko jangka panjang yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang tinggi. Untuk mengurangi biaya agensi tersebut, pemerintah dapat melakukan pengungkapan laporan keuangannya dengan lebih komprehensif.

Intergovernmental revenue dikenal dengan istilah dana perimbangan, dimana pemerintah pusat memberikan dana suntikan untuk pemerintah daerah dan penggunaan

dana tersebut pastinya akan dipantau atau diawasi oleh pemerintah pusat, semakin besar jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat maka akan semakin ketat pula pengawasannya dan dari situ pemerintah daerah akan meningkatkan pengelolaan keuangannya supaya pengungkapan laporan keuangannya sesuai dengan standard akuntansi pengungkapan atau SAP.

Patrick (2007) mendefinisikan *intergovernmental revenue* sebagai jenis pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi Pemerintah Daerah. Sebagai timbal baliknya Pemerintah Daerah membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran menurut Undang-undang. Semakin besar *intergovernmental revenue* mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemda. Variabel size diukur dengan Ln Total Aset, umur Pemda diukur dalam satuan tahun, leverage diukur dengan membagi total aset dengan total hutang, *Intergovermental revenue* dengan membagi total dana perimbangan dengan total pendapatan. Salah satu jenis data dalam sebuah penelitian yaitu data sekunder, merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2016-2019 yang telah diaudit oleh BPK RI. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2016-2019 berjumlah 34 Provinsi. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria (1) Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Provinsi pada tahun 2016-2019 yang telah diaudit oleh BPK, (2) Menyediakan empat komponen LKPD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, (3) Menyediakan data umur administratif Pemda yang diukur dari undang-undang pembentukannya sampai dengan tahun 2016 dan 2019. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi

klasik terhadap data. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah yang menyediakan informasi laporan keuangan secara berturut-turut selama 4 tahun dari periode 2016-2019. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan (*Annual Report*) yang dipublikasikan dimasing-masing web BPK tiap provinsi. Sampel yang digunakan dipilih secara purposive sampling atau sesuai kriteria yang telah ditentukan. Jumlah populasi dalam penelitian sebanyak 34 Pemerintah Daerah. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dari total populasi sebanyak 34 Pemerintah Daerah diperoleh sampel sejumlah 18 pemerintah daerah dengan periode penelitian tahun 2016-2019. Jadi jumlah data yang dapat diolah sebanyak 18 x 4 tahun yaitu 72 data.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

		<i>Constant</i>	<i>Size (X1)</i>	<i>Umur Pemda (X2)</i>	<i>Leverage (X3)</i>	<i>Intergovernmental Revenue (X4)</i>	
<i>Unstd. Coefficients</i>	B	-0,630	1,261	0,066	-0,001	0,006	
	Std. Error	0,106	0,576	0,039	0,008	0,007	
	t	-5,963	2,188	1,705	-0,128	0,916	
	Sig.	0,000	0,032	0,093	0,898	0,363	
F hitung		:	2,783				
Sig. F		:	0,034 ^b				
<i>Adjusted R Square</i>		:	0,091				

Sumber : Output SPSS 2021

Berdasarkan tabel 1 maka persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = -630 + 1,261 \text{ size} + 0,66 \text{ Umur Pemda} - 0,001 \text{ leverage} + 0,006 \text{ intergovernmental revenue} + e$$

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa uji t untuk H₁ menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,188 dengan nilai sig. 0,032, maka dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima. Uji t untuk H₂ menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,705 dengan nilai sig. 0,093, maka dapat disimpulkan bahwa H₂ ditolak. Uji t untuk H₃ menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,128 dengan nilai sig. 0,898, maka dapat disimpulkan bahwa H₃ ditolak. Uji t untuk H₄ menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,916 dengan nilai sig. 0,363, maka dapat disimpulkan bahwa H₄ ditolak. Hasil uji F pada tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,034, maka dapat disimpulkan bahwa H₅ diterima.

Hasil analisis regresi dari tabel 1 dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,091 atau 9,1%. Dengan demikian Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh 4 variabel independen yaitu *Size*, *Umur Pemda*, *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* sebesar 9,1%, sedangkan sisanya sebesar 91% (100% - 9,1% = 91%) merupakan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Suatu daerah yang mempunyai *size* yang lebih besar maka akan memiliki tuntutan yang lebih besar pula agar dapat mengungkapkan lebih banyak lagi LKPD. Dalam konteks organisasi pemerintahan, rakyat memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agent untuk menjalankan tugas pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin besar ukuran pemerintah maka semakin besar pula tuntutan rakyat untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap sebagai upaya peningkatan transparansi dan mengurangi asimetri informasi.

Dengan demikian *size* yang berukuran besar berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil pengujian menunjukkan arah pengaruh positif berarti pemerintah daerah yang berukuran besar akan lebih baik dalam pengelolaan dan penyajian tingkat pengungkapan LKPD.

Penemuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Patrick (2014), Setyaningrum & Syafitri (2012). Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa *size* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Pemerintah daerah yang memiliki umur yang belum lama akan berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat karena pemerintah daerah akan berusaha menunjukkan kredibilitas maupun reputasi pemerintah dimata masyarakat, sehingga akan menumbuhkan rasa keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lama dan tidaknya pemerintah daerah berdiri tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan, karena keduanya akan sama-sama memberikan kinerja yang semaksimal mungkin untuk masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penemuan baru mengenai pengaruh umur pemda terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang ditemukan oleh (Febriani, 2015)., dan. Iyoha (2012) menunjukkan bahwa umur pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian lainnya menunjukkan adanya pengaruh negative umur pemda terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Feriyanti et al (2015). Oleh karena itu, *umur pemdae* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi temuan baru yang sangat bertentangan dari hasil penelitian terdahulu.

Pemerintah daerah yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi cenderung tidak melakukan pengungkapan yang lebih luas dari pada Pemerintah daerah dengan rasio *leverage* yang rendah. Karena Pemerintah daerah enggan untuk mempublikasikan kewajiban (jangka pendek maupun jangka panjang) yang menunjukkan nilai besar, sehingga jika dipublikasikan dapat meragukan masyarakat. Selain itu *leverage* tidak dapat menjadi pedoman dalam menentukan luas pengungkapan wajib laporan keuangan hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2001) dan Irawan (2010) yang meneliti tentang pengaruh signifikansi perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Schipper (1981) dalam Marwata (2001) menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Semakin tinggi rasio *leverage* maka perusahaan akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif.

Fokus pemerintah lebih diarahkan pada pengelolaan aset daerah yang sering mengalami masalah dan dianggap lebih material. Kompetensi pengelola keuangan yang masih rendah juga menyebabkan tingkat pengungkapan menjadi rendah. Hal ini terjadi

karena total pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer dalam hal ini yang dialokasikan oleh pemerintah pusat digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga daerahnya, belum untuk upaya dalam meningkatkan pengungkapan pada LKPD.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penemuan baru mengenai pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang ditemukan oleh, Agnecia dan Christophorus (2015) menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian lainnya menunjukkan adanya pengaruh negative *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan (Setyowati, 2016) Oleh karena itu, *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi temuan baru yang sangat bertentangan dari hasil penelitian terdahulu.

KESIMPULAN

Penelitian ini mempunyai kesimpulan sebagai berikut : *Size* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Umur pemda*, *Leverage*, dan *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Size*, *Umur pemda*, *leverage*, *intergovernmental revenue* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Koefisien determinasi tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini hanya sebesar 9%, karenanya untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan seperti jumlah SKPD, spesialisasi pekerjaan, ukuran legislatif dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, N. U. (2013). *Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan likuiditas terhadap luas pengungkapan laporan*.
- Hilmi, A. Z. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009. . . *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok*.
- Ii, B. A. B., Teori, A. L., & Keagenan, T. (n.d.). *No Title*.
- Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta*.
- Mandasari, P. (2009). . Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government. *Tesis Master. Universitas Sebelas Maret*.
- Munawir, S. (2001). . Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat. *Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty*.
- Nasser, A. (2009). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. *Tesis Universitas Sumatera Utara Di Publikasikan*.
- Patrick, P. A. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. . . (Retrieved August 8, 2011, from *Accounting & Tax Periodicals, Publication No. AAT 3266180*).

- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). *Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan*. 9(2), 154–170.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh karakteristik Pemda terhadap kinerja keuangan Pemda*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 1–76.
- Syafitriani, F. (2012). *Analisis pengaruh karakteristik Pemerintah daerah terhadap pengungkapan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Vol. 2 Edisi 9*.
- Widaryanti, Widaryanti, Sari, Widalia, Karim, Kurniati, Timotius, Elkana, Bon, A. T. (2021). *The determinants of capital structure in manufacturing companies listed on The Indonesia Stock Exchange*. *Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapore, March 7-11, 2021, 11, 4712*. <http://www.ieomsociety.org/singapore2021/papers/827.pdf>
- Zimmerman, J. L. (1977). *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives*. *Journal of Accounting Research*.